

TESIS

**PENEGAKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN ADAPTASI
KEBIASAAN BARU DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN COVID-19 DI KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA BARAT**

*Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh:

NIKO HARY MANGGALA
NIM 2020112016

Dosen Pembimbing:

**Prof. Dr. Kurnia Warman, S.H., M. Hum.
Dr. Hengki Andora, SH. LL.M.**



PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

**PENEGAKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN ADAPTASI
KEBIASAAN BARU DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN COVID-19 DI KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA BARAT**
Niko Hary Manggala, 2020112016, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas
Hukum Universitas Andalas, 120 halaman, Tahun 2023

ABSTRAK

Sebagai daerah otonom, baik pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan yang telah diserahkan kepadanya yang kemudian dituangkan pengaturannya dalam suatu peraturan daerah. Peraturan daerah memuat urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi wilayah yang bersangkutan. Namun pada pelaksanaannya, peraturan yang dibentuk oleh suatu daerah telah menjangkau dan diberlakukan di daerah lain. Hal ini dapat ditemukan pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 yang merupakan peraturan daerah provinsi Sumatera Barat yang pemberlakuannya menjangkau wilayah kabupaten/kota di Sumatera Barat yang dibuktikan dengan adanya penegakan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten/kota apabila terjadinya pelanggaran atas kewajiban yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di wilayah kabupaten/kota. Hal tersebut kemudian melatarbelakangi pertanyaan dalam penelitian tesis ini, yaitu: bagaimana penegakan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dan bagaimana efektivitas penegakan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis atau empiris. Penelitian ini memanfaatkan data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan Perda Nomor 6 Tahun 2020 di kabupaten/kota dilaksanakan secara preventif dan represif secara langsung oleh Satpol PP Kabupaten/Kota tanpa melibatkan Satpol PP Sumbar. Hal ini berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Penegakan Perda Nomor 6 Tahun 2020 yang memberikan kuasa kepada Satpol PP Kabupaten/Kota untuk melaksanakan penegakan atas pelanggaran Perda Nomor 6 Tahun 2020 yang terjadi di wilayahnya tanpa perlu melibatkan Satpol PP Sumbar. Berkaitan dengan efektifitas pelaksanaannya, penegakan Perda Nomor 6 Tahun 2020 yang merupakan Peraturan Daerah Sumatera Barat dapat dilaksanakan secara efektif di Kabupaten/Kota oleh Satpol PP Kabupaten/Kota. Hal ini dikarenakan pada kondisi darurat pandemi COVID-19 sehingga Perda Nomor 6 Tahun 2020 merupakan satu-satunya payung hukum yang dapat dijadikan pedoman oleh pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat untuk menyelenggarakan adaptasi kebiasaan baru di daerahnya

Kata Kunci : Penegakan, Peraturan Daerah, Sumatera Barat, Adaptasi Kebiasaan Baru, COVID-19

**ENFORCEMENT OF WEST SUMATRA PROVINCE REGULATION NUMBER
6 OF 2020 CONCERNING IMPLEMENTATION OF NEW HABITS IN THE
FRAMEWORK OF PREVENTION AND CONTROL OF COVID-19 IN
REGENCIES/CITIES IN WEST SUMATRA**

**Niko Hary Manggala, 2020112016, Master of Law Program, Faculty of Law,
Andalas University, 120 pages, Year 2023**

ABSTRACT

As an autonomous region, both provincial, district and city regional governments have the authority to manage their own households to carry out the governmental functions that have been delegated to them which are then set forth in a regional regulation. Regional regulations contain government affairs which are the authority of the regional government and only pass within the jurisdictional boundaries of the area concerned. However, in practice, the regulations established by one region have reached and been enforced in other regions. This can be found in the Regional Regulation of the Province of West Sumatra Number 6 of 2020 concerning Implementation of New Normal Adaptation in the context of Prevention and Control of COVID-19 which is a regional regulation of the province of West Sumatra whose application reaches regencies/cities in West Sumatra as evidenced by proper enforcement carried out by the district/city Civil Service Police Unit in the event of a violation of the obligations stipulated in the Regional Regulation of West Sumatra Province Number 6 of 2020 concerning Implementation of Adaptation of New Habits in the Context of Prevention and Control of COVID-19 in the district/city area. This then becomes the background to the questions in this thesis research, namely: how is the enforcement of Regional Regulations of West Sumatra Province Number 6 of 2020 concerning Implementation of Adaptation of New Habits in the Context of Prevention and Control of COVID-19 in Regencies/Cities in West Sumatra and how effective is the enforcement of Regional Regulations? West Sumatra Province Number 6 of 2020 concerning Implementation of New Normal Adaptations in the framework of the Prevention and Control of COVID-19 in Regencies/Cities in West Sumatra. The research method used is sociological or empirical juridical. This study utilizes primary data and secondary data. The results of this study indicate that the enforcement of Regional Regulation Number 6 of 2020 in districts/cities is carried out in a preventive and repressive manner directly by the Regency/City Satpol PP without involving the West Sumatra Satpol PP. This is based on the Cooperation Agreement for Enforcement of Regional Regulation Number 6 of 2020 which authorizes Regency/Municipal Satpol PP to carry out enforcement of violations of Regional Regulation Number 6 of 2020 that occur in their area without the need to involve the West Sumatra Satpol PP. With regard to the effectiveness of its implementation, enforcement of Regional Regulation Number 6 of 2020 which is a Regional Regulation of West Sumatra can be implemented effectively in Regencies/Cities by Regency/City Satpol PP. This is due to the emergency condition of the COVID-19 pandemic so that Regional Regulation Number 6 of 2020 is the only legal umbrella that can be used as a guideline for district/city regional governments in West Sumatra to adapt new habits in their area.

Keywords: Enforcement, Regional Regulation, West Sumatra, Adaptation to New Habits, COVID-19